



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG  
INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN  
DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditetapkan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.

#### Pasal 2

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- a. dukungan penggajian PPPK Daerah;
- b. dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. dukungan bidang pendidikan;
- d. dukungan bidang kesehatan; dan
- e. dukungan bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 3

- (1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan:
  - a. jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun berjalan;
  - b. gaji pokok dan tunjangan melekat; dan
  - c. jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.
- (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan jumlah Kelurahan setiap Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dukungan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM pada tiap urusan tiap pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data indeks capaian SPM masing-masing bidang dari kementerian/lembaga terkait.
- (5) Dalam hal data indeks capaian SPM masing-masing bidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada setiap urusan Pemerintahan Daerah.
- (6) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada setiap urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja setiap bidang.
- (7) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan indikator-indikator bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan

umum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan bagian DAU dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen PPPK, gaji, dan tunjangan PPPK.
- (2) Penggunaan bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 5

Rincian pagu bagian DAU dukungan penggajian PPPK Daerah per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban pendanaan bagi Kelurahan.
- (2) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
- (3) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar alokasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN, dengan memperhatikan jumlah Kelurahan pada setiap Pemerintah Daerah.
- (5) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU.
- (6) Rincian pagu bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan per Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; atau
  - b. dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja Kelurahan.
- (2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu bagian DAU dukungan pendanaan Kelurahan.
- (3) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (4) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU dukungan pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. angka kemiskinan;
  - c. luas wilayah;
  - d. ketersediaan pelayanan dasar;
  - e. kondisi infrastruktur;
  - f. transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan; dan/atau
  - g. indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.
- (5) Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/atau nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan prioritas nasional.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait dengan:
  - a. kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pendidikan; dan
  - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah.
- (4) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima

- persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang pendidikan.
- (5) Bagian DAU dukungan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
- a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
  - c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait dengan:
- a. kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang kesehatan;
  - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan; dan
  - c. belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional, yang terdiri atas:
    - 1) pengelolaan jaminan kesehatan nasional masyarakat beserta dengan tunggaknya; dan
    - 2) pengelolaan jaminan kesehatan nasional ASN Daerah, yaitu pembayaran iuran wajib peserta pekerja penerima upah ASN Daerah bagian Pemerintah Daerah beserta dengan tunggaknya.
- (3) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.
- (4) Belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.
- (5) Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
- a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
  - c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pekerjaan umum.
- (3) Bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
  - a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
  - c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

#### Pasal 11

- (1) Selain digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), bagian DAU dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman Daerah.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis sesuai prioritas Daerah di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum, dan jenis kegiatannya sesuai dengan rincian dalam huruf A, huruf B, dan huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK, dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5):
  - a. lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah, besaran penganggaran bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam APBD dilakukan sebesar rasio jumlah Kelurahan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah dibagi dengan jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikali dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau
  - b. lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah, besaran penganggaran DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam APBD dilakukan paling banyak sebesar alokasi DAU dukungan pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD, kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD mendahului perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 13

Belanja yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

#### Pasal 15

- (1) Daerah dengan pencapaian SPM atau indikator kinerja Daerah bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum yang belum optimal dapat menyampaikan usulan rencana perbaikan kinerja kepada Kementerian Keuangan untuk dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 807

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG  
INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS  
BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN  
PENGUNAANNYA

A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN  
SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG  
PENDIDIKAN

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang  
Pendidikan untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Asrama Sekolah
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Fasilitas Parkir
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penataan Ruang/Sudut Baca
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Asrama Sekolah
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
51	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
52	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
53	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
54	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
55	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
56	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
57	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
59	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Laboratorium
60	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
61	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
62	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
63	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Asrama Sekolah
64	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
65	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Fasilitas Parkir
66	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
67	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penataan Ruang/Sudut Baca
68	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
69	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
70	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
71	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
72	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
73	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
74	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
75	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Asrama Sekolah
76	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
77	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
78	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Mebel Sekolah
79	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
80	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
81	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
82	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
83	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
84	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
85	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
86	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
87	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
88	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
89	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
90	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
91	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
92	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
93	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
94	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
96	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
97	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
98	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
99	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
100	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
102	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
104	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
105	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
106	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
107	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
108	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Asrama Sekolah
109	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
110	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Fasilitas Parkir
111	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
112	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Laboratorium
113	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
114	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
115	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
116	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
117	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
118	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
119	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
120	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
121	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
122	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
123	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Asrama Sekolah
124	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
125	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
126	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
127	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
128	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
129	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
130	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
131	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
132	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Mebel Sekolah
133	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
134	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
135	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
136	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
137	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
138	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
139	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
140	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
141	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
142	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
143	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
144	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
145	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
146	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
147	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
148	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
149	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
150	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
151	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
152	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
153	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
154	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
155	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
156	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
157	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
158	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
159	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah
160	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah
161	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
162	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
163	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
164	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
165	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus
166	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
167	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
168	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
169	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua
170	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua
171	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
172	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
173	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
174	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
175	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
176	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
177	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
178	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
179	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi
180	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
181	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
182	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
183	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
184	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
185	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
186	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembinaan Manajemen Dayah
187	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penelitian dan Pengembangan Dayah
188	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
189	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
190	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
191	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah
192	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren
193	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly
194	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly
195	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
196	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
197	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
198	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
199	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
200	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penetapan Standar Pendidikan Aceh
201	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
202	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh
203	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
204	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
205	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh
206	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
207	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
208	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
209	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
210	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami
211	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah
212	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan
213	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi
214	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
215	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
216	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi
3	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
12	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
13	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
14	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
15	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
16	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
17	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
18	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
19	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
20	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
21	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Pembangunan Sanggar PKK di Kampung
22	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung
23	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)
24	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)
25	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua
26	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung
27	Pengembangan Ekonomi Kampung	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata
28	Pengembangan Ekonomi Kampung	Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung
29	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
30	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
31	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
32	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
33	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
34	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
35	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
36	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
37	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
38	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
39	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
40	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
41	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
42	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
43	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
44	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
45	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
46	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
47	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
48	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
49	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Seleksi Atlet Daerah
50	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan ( <i>Sport Science</i> )
51	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
52	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
53	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
54	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
55	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
56	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
57	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
58	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
59	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
60	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
61	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
62	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
63	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
64	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
65	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
66	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
67	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
68	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
69	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
70	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
71	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
72	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
73	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
74	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
75	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
76	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
77	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
78	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
79	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Penetapan Cagar Budaya
80	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pelindungan Cagar Budaya
81	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengembangan Cagar Budaya
82	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pemanfaatan Cagar Budaya
83	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
84	Pengelolaan Museum Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
85	Pengelolaan Museum Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
86	Pengelolaan Museum Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
87	Pengelolaan Museum Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
88	Pengelolaan Museum Provinsi	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
89	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
90	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
91	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Sosialisasi Adat Istiadat
92	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan
93	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
94	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
95	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pelatihan Peradilan Adat
96	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
97	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pembinaan Mediasi Adat
98	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
99	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan
100	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
101	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Rapat Kerja MAA
102	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
103	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
104	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
105	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
106	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
107	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
108	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
109	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
110	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
111	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
112	Penguatan Museum Sonobudoyo	Pengelolaan Museum Sonobudoyo
113	Penguatan Museum Sonobudoyo	Pengembangan Museum Sonobudoyo
114	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
115	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
116	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
117	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta
118	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
119	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
120	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
121	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
122	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
123	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
124	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
125	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman
126	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
127	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif
128	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
129	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Budaya Bahari
130	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
131	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
132	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
133	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
134	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
135	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan
136	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Festival Kebudayaan Yogyakarta
137	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Yogyakarta
138	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah
139	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
140	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
141	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Selendang Sutera

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
142	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
143	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Seni Budaya Daerah
144	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta
145	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
146	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
147	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jagawarga
148	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Kewirausahaan Desa
149	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
150	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan
151	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
152	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
153	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa
154	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
155	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal
156	Pendidikan Berbasis Budaya	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
157	Pendidikan Berbasis Budaya	Kependidikan Kepramukaan
158	Pendidikan Berbasis Budaya	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
159	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
160	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
161	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
162	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
163	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
164	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
165	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
166	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan Deposit
167	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
168	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
169	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
170	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
171	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
172	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
173	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi
174	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
175	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan Katalog Induk Daerah
176	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan Bibliografi Daerah
177	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
178	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
179	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
180	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
181	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
182	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
183	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
184	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
185	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
186	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pendidikan
187	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
188	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
189	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
190	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
191	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
192	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
193	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
194	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
195	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
196	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
197	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
198	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
199	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
200	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
201	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyuluhan Transmigrasi
202	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelatihan Transmigrasi
203	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
204	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
205	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
206	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
207	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
208	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata
209	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga
210	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Bantuan Akhir Studi
211	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata
212	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah
213	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
214	Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
215	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
216	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
217	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
218	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
219	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
220	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan
221	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
222	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
223	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
224	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
225	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
226	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
227	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
228	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
229	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
230	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
231	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
232	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
233	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
234	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
235	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
236	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
237	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
238	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pelatihan Mawaris
239	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas
240	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
241	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
242	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Seminar Problematika Syariat Islam
243	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
244	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
245	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
246	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid
247	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pelaksanaan MTQ
248	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
249	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
250	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
251	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam
252	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
253	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
254	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
255	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
256	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
257	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
258	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
259	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
260	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
261	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Keluarga Islami
262	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
263	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
264	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman
265	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturrahman
266	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman
267	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh
268	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
269	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama
270	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
271	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Nadwah/Mubahasah Ilmiah
272	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
273	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Kajian Pedoman Keagamaan
274	Silaturahmi Ulama-Ulama	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
275	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
276	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota
277	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim
278	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe
279	Peradaban dan Tamadhun Aceh	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat
280	Peradaban dan Tamadhun Aceh	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri
281	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Keterangan:

Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung di bidang pendidikan yang didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

### 3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Asrama Sekolah
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Kantin Sekolah
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
51	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
52	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
53	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
54	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
55	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
56	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
57	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama
58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
59	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
60	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
61	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah
62	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
63	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
64	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa
65	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
66	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
67	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
68	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
69	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Belajar Peserta Didik

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
70	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
71	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
72	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
73	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
74	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
75	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
76	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
77	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
78	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
79	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
80	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
81	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
82	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
83	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
84	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
85	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
86	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
87	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
88	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
89	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
90	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
91	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
92	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
93	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel PAUD
94	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
95	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD
96	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
97	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
98	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
99	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
100	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
101	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
102	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
103	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
104	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD
105	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
106	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
107	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
108	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
109	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
110	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
111	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
112	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
113	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
114	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
115	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
116	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
117	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
118	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
119	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
120	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
121	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
122	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
123	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
124	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
125	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
126	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
127	Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
128	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
129	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
130	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Laboratorium
131	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
132	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
133	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
134	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
135	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
136	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
137	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
138	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
139	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
140	Penetapan Kurikulum Pendidikan Dasar Muatan Lokal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
141	Penetapan Kurikulum Pendidikan Dasar Muatan Lokal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
142	Penetapan Kurikulum Pendidikan Dasar Muatan Lokal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
143	Penetapan Kurikulum Pendidikan Dasar Muatan Lokal	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
144	Penetapan Kurikulum Pendidikan Dasar Muatan Lokal	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
145	Penetapan Kurikulum Pendidikan Dasar Muatan Lokal	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
146	Penetapan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Muatan Lokal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
147	Penetapan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Muatan Lokal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
148	Penetapan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Muatan Lokal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
149	Penetapan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Muatan Lokal	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
150	Penetapan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Muatan Lokal	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
151	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
152	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
153	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
154	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
155	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
156	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
157	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
158	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota
159	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
160	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota
161	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
162	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota
163	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
164	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
165	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
166	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
167	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
168	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
169	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembinaan Manajemen Dayah
170	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penelitian dan Pengembangan Dayah
171	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
172	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
173	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
174	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah
175	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren
176	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
177	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
178	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
179	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
180	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
181	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penetapan Standar Pendidikan Aceh
182	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
183	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
184	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh
185	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
186	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
187	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
188	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
189	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami
190	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah
191	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan
192	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi
193	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
194	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
195	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
5	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam
7	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
9	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
13	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
14	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
15	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
16	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
17	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
18	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
19	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
22	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
23	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
24	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
25	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
26	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
27	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
29	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA
30	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanian Kabupaten	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanian
31	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembagamasyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat
32	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
33	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
34	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
35	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
36	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
37	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
38	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
39	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
40	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
41	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
42	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
43	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
44	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
45	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
46	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
47	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
48	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
49	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
50	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
51	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
52	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
53	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
54	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
55	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
56	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
57	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
58	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
59	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
60	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
61	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
62	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
63	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
64	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
65	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
66	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
67	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
68	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
69	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
70	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
71	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
72	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
73	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
74	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
75	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
76	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
77	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
78	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
79	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
80	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
81	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
82	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
83	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
84	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
85	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
86	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
87	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
88	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
89	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
90	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
91	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
92	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
93	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
94	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
95	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
96	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
97	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya
98	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
99	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya
100	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya
101	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
102	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
103	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
104	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
105	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
106	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
107	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
108	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
109	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
110	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Sosialisasi Adat Istiadat
111	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan
112	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh
113	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
114	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Penguatan Peradilan Adat

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
115	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
116	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pembinaan Mediasi Adat
117	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
118	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Kapasitas MAA
119	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
120	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Rapat Kerja MAA
121	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
122	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
123	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
124	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat
125	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
126	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
127	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
128	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
129	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
130	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia
131	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
132	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
133	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
134	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
135	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
136	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
137	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
138	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
139	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman
140	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
141	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif
142	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
143	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Budaya Bahari
144	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
145	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
146	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
147	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
148	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
149	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan
150	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Festival Kebudayaan Yogyakarta
151	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja
152	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah
153	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
154	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat
155	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
156	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
157	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jagawarga
158	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Kewirausahaan Desa
159	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
160	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan
161	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi
162	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
163	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
164	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal
165	Pendidikan Berbasis Budaya	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
166	Pendidikan Berbasis Budaya	Kependidikan Kepramukaan
167	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
168	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
169	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
170	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
171	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
172	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
173	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
174	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Bahan Pustaka
175	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
176	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
177	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
178	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
179	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
180	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
181	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
182	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
183	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
184	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
185	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
186	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
187	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
188	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
189	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
190	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
191	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pendidikan
192	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
193	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
194	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
195	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
196	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
197	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
198	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
199	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Transmigrasi
200	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Transmigrasi
201	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
204	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
205	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
206	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
207	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
208	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
209	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
210	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
211	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
212	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
213	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
214	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
215	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
216	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
217	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
218	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
219	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
220	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
221	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
222	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
223	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
224	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
225	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
226	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
227	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
228	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
229	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
230	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
231	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
232	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
233	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
234	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
235	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
236	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
237	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
238	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
239	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
240	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
241	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
242	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pelatihan Mawaris
243	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas
244	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
245	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
246	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Seminar Problematika Syariat Islam
247	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
248	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
249	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
250	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid
251	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Pelaksanaan MTQ
252	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
253	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
254	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam
255	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam
256	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
257	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
258	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Masyarakat
259	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pelatihan Takmir Masjid
260	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
261	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
262	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
263	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
264	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Iteum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
265	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Keluarga Islami
266	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
267	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat
268	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/ Mushalla
269	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Qari Qariah
270	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Hafizh Hafizhah
271	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz
272	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
273	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah
274	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah
275	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah
276	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
277	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama
278	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
279	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Nadwah/Mubahasah Ilmiah
280	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
281	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Kajian Pedoman Keagamaan
282	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama
283	Silaturahmi Ulama-Ulama	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
284	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF
285	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**B. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG KESEHATAN**

**1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Provinsi**

<b>No.</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Uraian Subkegiatan</b>
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
12	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
13	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
14	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
16	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
17	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
18	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
19	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
20	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
21	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
22	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
23	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota
24	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
29	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
30	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
32	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
33	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
36	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
37	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
38	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
39	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
40	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
41	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
42	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
43	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
44	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
45	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
46	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
47	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
48	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
49	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
50	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
51	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
52	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
53	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
54	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
55	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
56	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
57	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
58	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
59	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
60	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
61	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
62	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
63	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
64	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
65	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik
66	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
67	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
68	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
69	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
70	Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
13	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
14	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
15	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
16	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu
17	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
18	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
19	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
20	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang
21	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
22	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
23	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
24	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang
25	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
26	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
27	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan
28	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang
29	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
30	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
31	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
32	Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
33	Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
34	Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
35	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
36	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
37	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
38	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
39	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
40	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
41	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
42	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
43	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelayanan Kesehatan Transmigran
44	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
45	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
46	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
47	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Penyediaan Dana General Check-up Pimpinan dan Anggota DPR PB
48	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
49	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten
50	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
12	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
15	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
16	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin
17	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Bahan Habis Pakai

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
18	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
21	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
22	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
23	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
29	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
30	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
32	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
33	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
36	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
37	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
38	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
39	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
40	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
41	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
42	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
43	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
44	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
45	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
46	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
47	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
48	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
49	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
50	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
51	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
52	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
53	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
54	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
55	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
56	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
57	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
58	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
59	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
60	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
61	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
62	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
63	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
64	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
65	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
66	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
67	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
68	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
69	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
71	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
72	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
73	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
74	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
75	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
76	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
77	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
78	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
79	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
80	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
81	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
82	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
83	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
84	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
85	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
86	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
87	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
88	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
89	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
90	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
91	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
92	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
93	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
94	Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
15	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
16	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
17	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
18	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
19	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Sosial
20	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
21	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
22	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
23	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
24	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
25	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
26	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
27	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
28	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
29	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
30	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
31	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
32	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
33	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
34	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
35	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
36	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
37	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
38	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
39	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
40	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
41	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
42	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
43	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
44	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
45	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
46	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
47	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
48	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK
49	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
50	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
51	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
52	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
53	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
54	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
55	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
56	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
57	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
58	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
59	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
60	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
61	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
62	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
63	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
64	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
65	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan KB Pria
66	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
67	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
68	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
69	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB
70	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
71	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
72	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
73	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
74	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
75	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
76	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
77	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM**

**1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi**

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Unit Air Baku
6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
11	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
12	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
13	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
14	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
15	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi
16	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
17	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
18	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
19	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
20	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
21	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
22	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
23	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
24	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
25	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
26	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
28	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
29	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
30	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaian
31	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaian
32	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
33	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
34	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
35	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
36	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
37	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
38	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
39	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
40	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
41	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
42	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
43	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
44	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
45	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Fasilitasi Kerja Penyelenggaraan Pengelolaan Air Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
46	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Sabo
11	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Check Dam
12	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Breakwater
13	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
14	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
15	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendungan
16	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai
17	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
18	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kanal Banjir
20	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
21	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
22	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Sabo
23	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Check Dam
24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Breakwater
25	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
26	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tanggul Sungai
27	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
28	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
29	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kanal Banjir
30	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
31	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
32	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Sabo
33	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Check Dam
34	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Breakwater
35	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
36	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
37	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Danau
38	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai
39	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air
40	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
41	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
42	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
43	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
44	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
45	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
46	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
47	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
48	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
49	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
50	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
51	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
52	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Danau
53	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
54	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air
55	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
56	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
57	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi
58	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
59	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
60	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
61	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
62	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
63	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bendung Irigasi
64	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
65	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
66	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
67	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
68	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
69	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
70	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
71	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
72	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
73	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
74	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA
75	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
76	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan TPA/TPST/SPA
77	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
78	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
79	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
80	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
81	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
82	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
83	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
84	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
85	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
86	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
87	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
88	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
89	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
90	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
91	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
92	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
93	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
94	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
95	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi
96	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya
97	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
98	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
99	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
100	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
102	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
103	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
104	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
105	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
106	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota
107	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
108	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
109	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
110	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengelolaan Leger Jalan
111	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
112	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan
113	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar
114	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
115	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan
116	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan
117	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan
118	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan
119	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan
120	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Flyover
121	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Underpass
122	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Terowongan/Tunnel
123	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penggantian Jembatan
124	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jembatan
125	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jembatan
126	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan
127	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jembatan
128	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
129	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
130	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Unit Air Baku
6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
11	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
12	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
13	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
14	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
15	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
16	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
17	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
18	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
19	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
20	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
21	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
22	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
23	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
24	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
25	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
26	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
28	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
29	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
30	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
31	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
32	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
33	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
34	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
35	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
36	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
37	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
38	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
39	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
40	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
41	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
42	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
43	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
44	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
45	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
46	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
47	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
48	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
49	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
50	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
51	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
52	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
53	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
54	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
55	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
56	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan
3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
4	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan
5	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar
6	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan
8	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan
9	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan
10	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan
11	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan
12	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Flyover
13	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Underpass
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Terowongan/Tunnel
15	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian Jembatan
16	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jembatan
17	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan
18	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan
19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
20	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
21	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan
22	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai
23	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
25	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Pembangunan Kanal Banjir

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
26	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
27	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
28	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Sabo
29	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Check Dam
30	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Breakwater
31	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
32	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
33	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendungan
34	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai
35	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
36	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
37	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kanal Banjir
38	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
39	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
40	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Sabo

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
41	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Check Dam
42	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Breakwater
43	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
44	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tanggul Sungai
45	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
46	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
47	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kanal Banjir
48	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
49	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
50	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Sabo
51	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Check Dam
52	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Breakwater
53	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
54	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
55	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Danau
56	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
57	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
58	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
59	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
60	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
61	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
62	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
63	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
64	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
65	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
66	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
67	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
68	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
69	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
70	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Danau
71	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
72	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
73	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
74	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi
75	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
76	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
77	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
78	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
79	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
80	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bendung Irigasi
81	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
82	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
83	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
84	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
85	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
86	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
87	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
88	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
89	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
90	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
91	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
92	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
93	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan
94	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
95	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
96	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS
97	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
98	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
99	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
100	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
102	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
103	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
104	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
105	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
106	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
107	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
108	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
109	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
110	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
111	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
112	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
113	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
114	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
115	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
116	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
117	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
118	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
119	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
120	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
121	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
122	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
123	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
124	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
125	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
126	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
127	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
128	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
129	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
130	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
131	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota
132	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
133	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
134	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
135	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
136	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
137	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
138	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan, Penataan Bangunan dan Lingkungan
139	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
		Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
140	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
141	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
142	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
143	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
144	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jembatan
145	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
146	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
147	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
148	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Strategis Desa
149	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa
150	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan Gantung
151	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM